

Forum Freedom 57, 19 Juni 2006

Tema: Pancasila II

Nara sumber : Dawam Rahardjo

Petikannya:

Bagaimana kaum liberal Indonesia mengkaji berbagai masalah nyata yang ada di tengah kita? Freedom Institute bekerja sama dengan radio 68H sajikan Forum Freedom....

Hamid Basyaib (HB)

Halo, selamat pagi saudara... Anda berjumpa lagi dengan Hamid Basyaib dalam Forum Freedom. Satu program yang diselenggarakan Freedom Institut Jakarta bekerjasama dengan radio KBR 68H. Tamu saya pagi ini masih Profesor M. Dawam Rahardjo. Selamat pagi Mas Dawam...

Dawam Rahardjo (DR)

Selamat pagi...

HB

Kita masih membicarakan Pancasila. Minggu lalu kita sudah membicarakannya dan Anda sudah menjelaskannya dengan sangat terpinci. Sekarang kita akan perdalam lagi. Minggu lalu Anda pun sudah bicara dasar-dasar Pancasila. Anda mengatakan bahwa Pancasila itu sebetulnya berdasarkan tiga prinsip: liberalisme atau *civil liberty*, pluralisme atau kemajemukan, dan sekularisme atau kebangsaan. Pada saat itu (perbincangan minggu lalu) Anda tak segan-segan menggunakan kata-kata yang bagi sebagian orang masih dianggap kotor, tabu.

Sekarang kita maju sedikit. Sekarang Anda dan teman-teman mau menghidupkan kembali Pancasila sebagai satu-satunya solusi yang mungkin bagi banyak problem-problem kultural dan sosial di Indonesia ini. Tantangannya banyak juga. Misalnya ada kelompok-kelompok agama. Kelompok-kelompok yang tidak puas hanya dengan mengurus agama, tetapi merasa punya ide-ide ampuh untuk mengurus politik. Misalnya ada kelompok Hizbutahrir Indonesia yang memprogandakan sistem khilafah yang dengan sendirinya berlawanan dengan prinsip dasar negara kita dan Pancasila. Bagaimana Anda melihat kelompok-kelompok semacam ini?

DR

Sekarang ini reformasi menimbulkan satu kesan yang keliru mengenai demokrasi. Jadi seolah-olah demokrasi itu memberikan kesempatan bagi kita untuk mengeluarkan ide apa saja. Tapi harus diingat bahwa kalau kita ini menganut demokrasi Pancasila, itu ada rambu-rambunya. Misalnya saja, kalau demokrasi itu menyebabkan orang itu anti agama, itu harus dilarang. Kalau ada pelaksanaan demokrasi yang melanggar Hak Asasi Manusia (HAM), juga harus dilarang. Kalau ada demokrasi yang mengakibatkan perpecahan pada bangsa Indonesia, itu harus dilarang. Itu tidak boleh (ada). Kalau demokrasi dilaksanakan dengan absolutisme, itu pun menyimpang. Kalau demokrasi itu tidak mendatangkan dan menghasilkan keadilan sosial, itu pun harus dibatasi. Karena itu kita harus menilai ke

mana arahnya kelompok seperti Hizbuttahrir itu. Kalau saya tidak salah arahnya adalah mendirikan khilafah Islam.

Khilafah Islam itu adalah cita-cita yang sudah ketinggalan zaman. Ide itu sudah tidak mungkin dilaksanakan. Ide Hizbutahrir itu kan didirikan di Timur Tengah. Ya, mestinya ide negara Islam itu diwujudkan dulu di sana. Tapi pada kenyataannya, kecuali Saudi Arabia dan (Iran [?]) , tak ada satu pun negara (yang berdasarkan syariat) Islam. Semuanya negara sekuler. Negara seperti Mesir, Syria, Tunisia, Aljazair itu negara-negara sekuler.

HB

Saudi Arabia pun bukan khilafah?

DR

Ya, bukan khilafah. Jadi khilafah itu tidak realistis. Apalagi ini mau digerakkan di Indonesia. Ini jelas bertentangan dengan Pancasila. Sebab khilafah itu konsep negara agama. Konsep negara agama yang menggabungkan antara otoritas negara dan kenegaraan. Ini kan menimbulkan absolutisme. Ini akan memberangus demokrasi. Karena itu tidak bisa dilaksanakan di Indonesia.

HB

Apakah itu berlaku bagi kelompok lain yang tidak mempromosikan khilafah?

DR

Ya, misalnya kelompok lain yang memperjuangkan syariat Islam. Itu enggak bisa.

HB

Apalagi dengan menggunakan kekerasan?

DR

Ya. Ide untuk melaksanakan syariat Islam itu sendiri sudah keliru.

HB

Kelirunya di mana?

DR

Seperti yang sudah saya katakan Minggu lalu bahwa syariat itu didasarkan pada keyakinan. Jadi orang itu hanya bisa melaksanakan kalau dia yakin, beriman. Kalau tidak beriman, ya tidak bisa.

HB

Enggak bisa dipaksa aparat negara untuk sholat, puasa, dst?

DR

Tidak bisa. Tidak bisa dipaksa aparat negara. Semua keyakinan itu tidak bisa dipaksakan.

HB

Sekarang ini banyak kelompok-kelompok yang memaksakan penerapan syariat Islam. Syariat Islam harus dipaksakan berlaku. Ini kan aspirasi lama sejak (para pendahulu) kita mendiskusikan dasar negara pada 1945 dan diulang di Majelis Konstituante pada 1959.

Pada sila pertama Pancasila kan awalnya disebut “ketuhanan yang maha Esa dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi para pemeluknya”. Artinya itu ada aspirasi untuk memaksakan perintah-perintah religius dengan tangan negara. Pada waktu itu semua kelompok Islam sepakat. Modernis dan tradisional, NU dan Muhammadiyah semuanya sepakat. Ini agak aneh. Kenapa itu?

DR

Karena mereka tidak menyadari konsekuensi dari pelaksanaan syariat Islam. Mereka tidak menyadari bahwa syariat Islam itu melanggar demokrasi dan Hak Asasi Manusia, dsb. Tapi sekarang ini sudah timbul suara-suara (yang menentang syariat Islam). Misalnya saja Moeslim Abdurrahman. Dia mengatakan bahwa jika syariat Islam itu dilaksanakan, maka korban yang pertama adalah kaum perempuan. Kesadaran ini mulai timbul. Ini adalah pikiran lama yang membeku, yang susah dirubah. Karena itu saya mengusulkan agar gerakan Islam itu harus melakukan reorientasi. Betul-betul melakukan reorientasi.

HB

Arahnya ke mana? Secara radikal atau gradual?

DR

Misalnya saja mengenai tujuan perjuangan umat Islam. Apa itu tujuan perjuangan umat Islam? Sekarang ini kan tujuan perjuangan umat Islam adalah memenangkan Islam untuk menjadi golongan yang dominan; mempunyai kekuasaan yang hegemonik.

HB

Mereka (kelompok Islam) itu menganggap dirinya mayoritas, hampir 88 persen. Mereka pun pada akhirnya menganggap wajar kalau Islam mendominasi. Itu kan sama seperti dasar berdirinya ICMI?

DR

Itu tidak benar. Ini argumen yang selalu dikemukakan bahwa dasarnya adalah mayoritas umat Islam. Pendukungnya adalah umat Islam yang merupakan mayoritas. Mereka lupa bahwa di dalam mayoritas umat Islam itu ada bermacam-macam pikiran. Ada santri dan abangan. Orang abangan kan lebih banyak dari santri. Dalam konstituante, kaum abangan itu menang dan jauh lebih kuat. Jadi enggak benar kalau itu merupakan kehendak mayoritas. Dan mereka itu menentang negara Islam.

HB

Itu di masa lalu. Lalu sekarang?

DR

Sekarang apalagi. Sekarang lebih modern; lebih banyak orang yang sadar; orang makin menyadari Pancasila sehingga ini (argument mayoritas) menjadi sesuatu yang tidak rasional lagi. Jadi argumen mayoritas itu sudah tidak berlaku. Apalagi di dalam demokrasi kita itu tidak ada mayoritas dan minoritas.

HB

Mas Dawam, saya tertarik pada reorientasi tadi. Misalnya dalam konteks ini perjuangan Islam. Karena Islam ini paling banyak dan kelompok-kelompok Islamnya paling gigih untuk memperjuangkan (syariah Islam). Kemudian apa yang Anda bayangkan?

DR

Ya, betul. Kita harus mendirikan suatu negara dan membangun masyarakat berdasarkan mayoritas umat Islam yang plural, bukan yang monolistik. Dan yang plural itu adalah Pancasila. Hasilnya itu Pancasila.

HB

Kalau kita lihat di permukaan, yang aktif itu malahan kelompok-kelompok yang punya kecenderungan untuk menentang (Pancasila) meski mereka tidak terang-terangan. Ini karena batasan hukum tidak memungkinkan. Kita lihat tindakan-tindakannya, program-programnya, dan retorikanya itu tak sedikitpun merujuk pada Pancasila dan cenderung mau memakai sistem lain—negara Islam atau syariah Islam—yang tidak terelaborasi secara jelas. Di tengah alasan seperti itu, apa yang membuat Anda optimis bahwa yang plural yang akan menang?

DR

Pertama-tama, saya ingin mengatakan begini. Bahwa masyarakat kita sekarang ini sedang bingung. Karena apa-apa gagal. Di bidang apapun gagal. Di bidang ekonomi, politik, moral, kebudayaan, dsb, kita mengalami kegagalan. Ini menimbulkan frustrasi. Ketika frustrasi, orang mencari kambing hitam. Kambing hitamnya itu Pancasila. Tidak jelas. Kemudian mereka percaya bahwa Islam itu adalah solusi.

HB

Solusi untuk semua masalah?

DR

Iya, tapi *reason*-nya tidak jelas. Masak semua masalah yang ada di dunia ini bisa dipecahkan dengan model kunci inggris. Ini lucu. Islam solusi, semua beres. Kalau diterapkan syariat Islam, semua masalah ini beres. Ini enggak bisa. Karena tidak ada satu bukti di dunia ini yang bisa membenarkan pendapat bahwa Islam itu solusi. Jadi ini hanya ilusi. Karena itu kita harus sadar. Kita perlu perjuangan, perlu advokasi. Terutama dari umat Islam sendiri. Saya kira peranan organisasi besar Islam seperti NU dan Muhammadiyah itu penting. Sayangnya, NU dan Muhammadiyah itu sudah tidak memiliki kepemimpinan lagi.

HB

Ini pernyataan tajam sekali?

DR

Ya betul. Ini berdasarkan hasil survey Lembaga Survei Indonesia (LSI). Dalam survey ini dinyatakan bahwa banyak orang Islam yang menyetujui program FPI ketimbang program Muhammadiyah. Walaupun kelompok itu kecil, tapi mereka mendapat dukungan yang luas. Mereka mengambil inisiatif. Apalagi didukung oleh kekerasan yang menimbulkan rasa ketakutan, dsb. Karena itu organisasi-organisasi besar itu tersandra dan tidak bisa mengambil keputusan. Dalam menghadapi beragam isu, organisasi besar itu diam seribu bahasa.

HB

Seperti seorang yang lumpuh tak berdaya?

DR

Iya. Organisasi-organisasi besar itu tidak memberikan *guidance* sama sekali; mereka membiarkan umatnya berantakan. Misalnya ada tindakan-tindakan kekerasan. Mereka sama sekali tidak mengambil komentar. Mana ada organisasi besar seperti NU dan Muhammadiyah mengutuk tindakan-tindakan kekerasan yang dilakukan oleh FPI. Enggak ada. Mereka itu penakut.

HB

Anda sudah menguraikan mengenai organisasi besar yang mapan seperti NU dan Muhammadiyah yang mestinya punya peran besar dalam memberi *guidance* atau bimbingan pada umatnya. Anda menilai organisasi besar itu lumpuh. Mereka hampir tidak mengemukakan hal-hal signifikan, bahkan ketika situasi kekerasan menggejala atas nama agama. Ya, organisasi besar itu seperti seorang bisu dan tak berkaki. Mereka tak mengomentari hal serius untuk masalah yang sangat serius. Kalau situasinya muram seperti ini, lalu bagaimana arah ke depannya?

DR

Ya, yang pertama-tama harus menyadari mengenai Pancasila dan UUD 45 itu pemerintah dulu. Harus negara. Pemerintah harus memiliki tindakan dan sikap yang tegas. Seperti dengan mengatakan bahwa prinsip kita ini adalah prinsip sekuler. Kita sebagai negara tidak memihak kepada negara. Kita harus bersikap adil terhadap agama. Semua agama.

Ingat, bahwa kita perlu mempertimbangkan prinsip multikulturalisme. Sekularisme yang diterapkan di Kanada. Di Kanada itu golongan mayoritas justru tidak dibantu. Karena mereka sudah dianggap kuat. Yang dibantu itu justru kelompok-kelompok kecil.

HB

Mayoritas dan minoritas ini dalam arti agama atau etnis?

DR

Agama. Saya bicara dalam konteks agama. Jadi asal tidak melakukan penyelewengan-penyelewengan, kelompok-kelompok agama kecil itu dipelihara dengan baik dan diberi subsidi. Demikian juga di Singapura. Di sana kelompok Islam itu minoritas. Tapi di sana pendidikan Islamnya luar biasa maju. Orang-orang profesionalnya banyak dilahirkan dari lingkungan orang Islam. Fakultas ekonomi dan sains itu konon dikuasai oleh sarjana-sarjana muslim. Itu karena golongan minoritas ini masuk dalam konstitusi. Ditetapkan dalam konstitusi untuk dibantu.

Nah saya juga punya ide yang sama. Walaupun umat Islam di Indonesia mayoritas, tapi kita jangan berbuat sewenang-wenang. Sebagai mayoritas itu harusnya berbuat adil, bersikap dewasa.

HB

Justru karena mayoritas?

DR

Karena kita mayoritas, kita jadi sombong. Umat Islam di Indonesia itu mempunyai sikap 'mentang-mentang'. Ini harus dirubah. Dan yang bisa merubah ini adalah organisasi-organisasi besar seperti NU dan Muhammadiyah.

Seperti yang saya katakan tadi, dua organisasi besar Islam itu sekarang sudah tidak lagi memegang kepemimpinan. Dulu Cak Nur pada tahun 70-an mengatakan bahwa Muhammadiyah sudah tidak lagi menjadi agama pembaharu. NU sebetulnya mau/menuju ke pembaharuan, tapi setengah hati. Akhirnya tidak menjadi pembaharu. Malah sekarang menjadi golongan konservatif. Jadi gerakan Islam di Indonesia itu mundur. Karena itu visi dan misi gerakan perjuangan Islam sekarang harus dirombak total.

HB

Anda tadi menguraikan keberadaan mayoritas dan minoritas di tempat lain seperti Kanada dan Singapura. Tapi saya kira para pemimpin Muhammadiyah dan NU berargumen bahwa situasi yang dialaminya berbeda. Mereka mengatakan bahwa kita mayoritas dalam segi jumlah saja, tetapi dari sudut lainnya minoritas. Misalnya penguasaan asset-aset ekonomi. Jelas sekali semua itu tidak di tangan umat Islam. Misalnya alokasi-alokasi sumber-sumber daya politik. Sekarang agak berimbang. Kita tahu bahwa ICMI pun berdiri karena perasaan seperti itu: bahwa kita ini mayoritas, tetapi representasinya sangat minoritas. Ini harus dirubah. Jadi situasinya memang berbeda. Bagaimana kita mengatasi ini?

DR

Saya ingin bilang bahwa itu adalah urusan umat Islam sendiri. Tergantung dari umat Islam sendiri. Kita tak mungkin menanggungkan/menanggungkan semuanya pada negara. Negara itu ada keterbatasannya. Kuncinya itu adalah bahwa umat Islam harus memperbaiki dirinya sendiri; harus memperbaiki kualitasnya sendiri. Kalau yang minoritas itu bisa memperbaiki kualitas, mengapa yang mayoritas itu malah tidak. Jadi ada kesempatan yang besar bagi umat Islam untuk menjadi mayoritas dalam arti teknis. Itu lebih banyak kemungkinannya daripada golongan minoritas.

Umat Islam kan sebetulnya sudah mulai maju di bidang pendidikan. Lalu mempunyai kesadaran ekonomi. Ini penting sekali. Jadi umat Islam itu harus memiliki kesadaran ekonomi yang tinggi. Agama itu harus dijadikan motivasi sumber kegiatan ekonomi, seperti yang dikatakan Sutan Takdir Alisjahbana. Ini harus menjadi etos kerja. Kalau Islam ini menjadi etos kerja, maka saya yakin umat Islam ini akan menang. Dan yang paling penting, kita ini harus mempunyai kepercayaan pada diri sendiri. Sebab kalau kita mengharapkan dari negara, efeknya itu tidak baik. Pertama, ketergantungan pada negara. Kedua, bisa menimbulkan kerancuan dan korupsi. Golongan mayoritas itu lebih mudah melakukan kolusi daripada minoritas.

HB

Orang Islam di Indonesia meski mayoritas tapi masih saja mengeksklusifkan diri. Kita lihat hampir semua pemimpin di Indonesia, baik informal maupun formal (masuk dalam sistem negara), masih saja membedakan antara umat dan bangsa. Retorikanya selalu begitu. Saya selalu mengkritik itu. Misalnya ada orang bilang: 'demi kebaikan umat dan

bangsa'. Jadi mereka membedakan umat (Islam) dan bangsa. Bagaimana Anda melihat ini?

DR

Saya pikir sumbernya adalah pola pikir umat Islam sendiri. Pola pikir umat Islam ini kan selalu *ngurusin* hal yang tetek bengek. Dulu sebelum kemerdekaan, yang *diurusin* itu hanya soal-soal ibadah. Tapi sekarang yang *diurus* itu soal-soal syariat. Masalah ekonomi, demokrasi, dsb. Tapi masalah korupsi justru diabaikan. Jadi yang diperhatikan adalah hal-hal yang kecil ini. Dan yang kecil-kecil ini banyak rumitnya. Karena itu umat Islam enggak maju-maju. Sebetulnya hal-hal semacam ini harus ditinggalkan oleh umat Islam. Kita harus mengalihkan pada pembangunan. Pada kebangunan/kebangkitan umat; kebangkitan Islam sendiri.

HB

Ini menarik sekali. Anda menginginkan dan menganggap itu lebih baik. Adakah negara luar yang menerapkan itu? Anda punya contoh?

DR

Contoh seperti ini memang jarang. Tapi mungkin di Malaysia dan Singapura. Ekonomi orang melayu muslim di Singapura itu maju. Di sana ada orang melayu muslim yang punya supermarket terbesar dan terluas. Pendidikan mereka cukup tinggi. Kaum profesionalnya banyak sekali. Di sana ada *Association of Moslem Professional*..

HB

Kita kembali lagi ke tema Pancasila. Apa langkah praktis Anda untuk menyosialisasikan Pancasila ini?

DR

Saya harus optimistic. Bahkan harus melakukan perjuangan. Perjuangan saya sekarang adalah memberikan penjelasan tentang (keberadaan) Pancasila. Bagaimana historisnya, interaksinya, pro-kontra pembentukannya. Itu pertama. Kedua, seperti yang pernah saya utarakan, konsep Pancasila itu saya operasionalkan dengan tiga konsep: sekularisme, pluralisme, dan liberalisme.

Yang jadi masalah sekarang adalah bahwa banyak orang salah paham dan menginterpretasikannya secara salah. Sebagai contoh liberalisme. Liberalisme kan pada dasarnya ditentang oleh banyak masyarakat Indonesia. Bahkan Soekarno, Hatta, Soepomo. Karena asumsinya liberalisme ini dikaitkan dengan ekonomi. Kebebasan ekonomi atau kebebasan pasar yang menyebabkan imperialisme dsb. Liberalisme juga dianggap sebagai paham bebas-sebebasnya tanpa batas.

HB

Itu bukan bebas, itu liar ya?

DR

Itu anarki. Apakah ada kebebasan tanpa batas? Tidak ada. Kebebasan itu selalu dibatasi oleh kebebasan orang lain.

HB

Sayang waktunya habis. Terima kasih atas kehadiran Anda. Begitulah forum Freedom.
Sampai jumpa dan wassalam...